



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KUNCORO HARTO WIDODO
2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG KEUANGAN, ASET, SUMBER DAYA MANUSIA DAN SISTEM INFORMASI
3. NHK : 739779

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.630.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 817 m²/240 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.260.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 712 m²/500 m² di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 2.520.000.000
3. Tanah Seluas 525 m² di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 550.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 122 m²/100 m² di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 933.500.000

1. MOBIL, HONDA MOBILIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
3. MOTOR, VESPA SCOOTER Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
4. MOBIL, HONDA BRIO RS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
5. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT DAKAR Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 585.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.313.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	6.876.500.000
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.876.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi penuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.